



P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **RAMLI AZHARI Bin ABDUL SALAM AZHARI**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Batutua, Kelurahan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sebagai : **"Pemohon I"**;
2. **MURNIATI Binti HUSEN LAKAKU**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Batutua, Kelurahan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sebagai : **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP pada tanggal 18 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 14 Januari 1984 di Papela, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua dari Pemohon II bapak HUSEN LAKAKU yang diwakilkan kepada imam masjid bapak MUHAMMAD AZHARI (alm) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak ALI DULHASAN dan Bapak AHER PINUS (alm) dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 6.1 SINTA AZHARI, perempuan, lahir 15 pebruari 1993
 - 6.2 MUHAMMAD AZHARI, laki-laki, lahir 27 Maret 1995
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, sah, perkawinan antara Pemohon I (RAMLI AZHARI Bin ABDUL SALAM AZHARI) dengan Pemohon II (MURNIATI AZHARI Binti HUSEN LAKAKU) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1984 di Papela;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/980/HK.05/IX/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut terdapat penambahan dan perubahan isi permohonan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **LAMUSA LAHAMU Bin LABOTI LAHAMU**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat Kediaman di Batutua, Kelurahan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada 14 Januari tahun 1984 di papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa saksi turut hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak HUSEN LAKAKU yang diwakilkan kepada Imam masjid yaitu Bapak MUHAMMAD AZHARI (alm) dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh Bapak ALI DULHASAN dan Bapak AHER PINUS (Alm);
 - Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 5 orang, yang masing-masing bernama : Husnul Azhari, Suhartini Azhari, Sinta Azhari, Muhammad Azhari, dan Nilam Azhari;
 - Bahwa bagi para Pemohon pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama, dan hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri lain selain Pemohon II;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

2. **Labuha Lakota Bin Lalinga**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Batutua, Kelurahan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada 14 Januari tahun 1984 di papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi turut hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak HUSEN LAKAKU yang diwakilkan kepada Imam masjid yaitu Bapak MUHAMMAD AZHARI (alm) dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh Bapak ALI

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULHASAN dan Bapak AHER PINUS (Alm);

- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 5 orang, yang masing-masing bernama : Husnul Azhari, Suhartini Azhari, Sinta Azhari, Muhammad Azhari, dan Nilam Azhari;
- Bahwa bagi para Pemohon pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama, dan hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kelurahan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kupang hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada 14 Januari tahun 1984 di papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama HUSEN LAKAKU yang diwakilkan kepada Imam Masjid bapak MUHAMMAD AZHARI (alm) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Bapak ALI DULHASAN dan Bapak AHER PINUS (alm) dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada 14 Januari 1984?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama Lamusa Lahamu Bin Laboti Lahamu dan Labuha Lakota Bin Lalinga yang mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Kedua saksi tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan para Pemohon berupa fakta yang diketahuinya sendiri, serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tempat tinggal para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- Bahwa para Pemohon menikah pada 14 Januari 1984 di Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan sesuai syariat

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP



Islam;

- Bahwa para Pemohon tidak memiliki halangan menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sah yang lahir dalam pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan hingga saat ini mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mencatatkan pernikahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama berkaitan dengan syarat sah dan rukun pernikahan telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab l'annah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

وفي الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (l'annah at-Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses ijab qabul diwakilkan kepada orang lain, namun sejatinya yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II merupakan wali nasab yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap yang demikian itu dapat dibenarkan oleh kaedah hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas juga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Barat Daya yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, meskipun dalam posita dan petitum permohonannya para Pemohon meminta agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, namun oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/980/HK.05/IX/2016 Tanggal 17 Oktober 2016), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2016;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RAMLI AZHARI Bin ABDUL SALAM AZHARI**) dengan Pemohon II (**MURNIATI Binti HUSEN LAKAKU**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1984 di Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.H.I., M.H.** Sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **MOH. RIVAI, S.H.I., M.H.** dan **MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Drs. ZUBAIR, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

MOH. RIVAI, S.H.I., M.H.

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.H.I., M.H.

TTD

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP



Panitera,

TTD

Drs. ZUBAIR, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Jumlah | Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam |
| ribu rupiah) | |

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Kupang, 10 November 2016

PANITERA

Drs. ZUBAIR, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat di sini: penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sejak tanggal 25 Nopember 2016;
PANITERA

Drs. ZUBAIR, MH

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)